

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA SUMBERGONDO DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

by Stefanus Mete

Submission date: 12-Aug-2020 02:55AM (UTC-0400)

Submission ID: 1351265478

File name: PEMERINTAH_DESA_SUMBERGONDO_DALAM_PENGELOLAAN_DANA_DESA.docx.pdf
(124.71K)

Word count: 1078

Character count: 7465

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA SUMBERGONDO
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)

SKRIPSI



Disusun Oleh :
STEFANUS METE
NIM : 2015210064

KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG

2019

RINGKASAN

Evaluasi kebijakan merupakan pemberian nilai terhadap kinerja yang berupa program serta tugas pemerintah yang tidak pernah tertinggal adalah membuat kebijakan dan sekaligus melaksanakan kebijakan, memonitor dan mengevaluasi kebijakan pemerintah Desa Sumbergondo. Namun banyak sekali tugas pemerintah sehingga kebijakan membuat pilihan-pilihan atau prioritas, ada yang dilaksanakan oleh pemerintah dan ada juga yang tidak dilaksanakan dalam suatu program kebijakan. Beberapa bentuk kebijakan diantaranya berupa undang-undang, sesuai dengan UU pemdes 2014 no 6 sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan sangat banyak dan beragam tergantung jumlah level pemerintahan dan jenis masalah yang mau diselesaikan oleh kebijakan.

Didalam pengamatan ini tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana serta yang mempengaruhi di Desa Sumbergondo. Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini *snow ball sampling*. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan *triangulasi teknik*

Evaluasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa Widodo dalam Setyawan (2017:168) mengatakan bahwa dalam melakukan evaluasi suatu kebijakan dalam peraturan permendagri No. 20 tahun 2018 proses pencairannya DD biasanya pada bulan februari setelah musrebang. Namun secara evaluasi kebijakan pemerintah terhadap penganggaran baik dari segi pembangunan, maupun pemberdayaan dengan total 1.186.980.400; dan ada macam bentuk transparansi bentuk transparansi pemerintah dalam melibatkan masyarakat untuk mengimplementasikan DD

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, dan Pengelolaan Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemajuan Suatu daerah sangat bergantung terhadap kebijakan pemerintah serta seiring juga perkembangan ilmu pengetahuan ditopang dengan canggihnya teknologi dalam berbagai bidang, menurut pemerintah tidak mendominasi rakyatnya dalam penyelenggaraan hidup bersama, dan fokus pemerintah Desa meningkatkan peran-peran sumber daya yang ada. Pada dasarnya evaluasi kebijakan merupakan pemantauan terhadap keseluruhan atau sebagian dari proses kebijakan publik, apakah berjalan secara maksimal sesuai dengan gagasan awal, atau sebaliknya menuai banyak kendala yang menjadi hambatan. Tujuan tersebut tidak lain dan tidak bukan agar mendapatkan data yang diperlukan mengenai kebijakan publik dimaksud, agar dijadikan bahan rujukan nantinya untuk memperbaiki (meningkatkan), menggantikan, atau menghentikannya. Lebih konkretnya, evaluasi dimaksud untuk mengetahui hubungan kebijakan publik terhadap akibat atau dampak yang ditimbulkan serta efeknya pada kehidupan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.

Dalam dekade sekarang, kata kebijakan sangat penting dan selalu digunakan di dalam implementasi kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, dalam kaitan itu, muda di dalam kebijakan pasti banyak tumpang tindih yang terjadi dan membawa memberi dampak kebijakan, disinilah lantas diberi makna sebagai tindakan-tindakan politik (*pilitical actions*) dalam hal

ini dikemukakan dari sudut pandang peneliti, bahwa kebijakan itu merupakan konsep perumusan yang akan diimplementasikan, dengan membawa dampak dan kepentingan bersama dalam suatu kebijakan.

Tugas pemerintah adalah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan suatu saat melaksanakan kebijakan publik, dan pada saat tertentu pula akan dilakukan proses evaluasi termasuk di dalam monitor kebijakan publik, namun fenomena yang terjadi di masyarakat, kebijakan ternyata mengalami perkembangan persepsi. perkembangan persepsi ini lebih disebabkan karena pola pikir manusia cenderung berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Nugroho dalam Setyawan 2017:1)

Tugas umum adalah tugas yang berkenaan dengan bidang pemerintahan itu sendiri, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan. Dari keseluruhan tugas umum pemerintah tersebut, semua kembali pada konteks “kemasyarakatan” yang dipadankan dengan kata kepublikan atau kekhayalan, yang terdiri dari berbagai ragamnya, mulai pendidikan yang ditempuhnya, kebutuhan yang diharapkan, strata sosial yang diduduki, dengan aktivitas yang dilakukan dan seterusnya. pada hakikatnya segala tugas pemerintah mengarahkan pada penetapan kebijakan positif, untuk mendapatkan hal positif terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Pemerintah Desa diberikan wewenang sepenuhnya untuk mengelola keuangan Desa, mulai dari merencanakan hingga menyusun laporan serta mempertanggungjawabkan secara mandiri. Salah satunya, bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. mengenai hal tersebut, sumber daya manusia sangat berperan penting. Untuk mendukung lancarnya pengelolaan dana Desa, dibutuhkan sumber daya manusia atau Aparatur Pemerintah Desa yang berkompetensi atau berkualitas mengenai hal tersebut. Aparatur Pemerintah Desa harus memahami regulasi yang mengatur ataupun prosedur serta alur tentang pengelolaannya, sehingga pemerintah Desa benar-benar siap untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengelola DD tersebut sudah relevan dengan UUD pemerintah desa sudah melakukan keterbukaan dan mengikuti aturan yang berlaku.

Pemerintah Desa sangat berperan dalam mengelola keuangan dan Desa, sehingga diharapkan pemerintah Desa betul-betul memahami mekanisme, sertasiap untuk mengelola, melaksanakan, memonitor keuangan Desanya. Dalam hal ini, Pemerintah Desa juga dinilai belum memahami prosedur serta belum siap mengelola dana Desa tersebut. Sehingga akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia yaitu pelayanan, pemberdayaan, serta proses mengevaluasi DD penyaluran APBN. walaupun minim SDM tetapi pemerintah sedang mengupayakan mengelola atau memberdaya semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerataan di suatu Desa tidak ada penyimpangan atau penyelewengan yang ada di setiap tatanan masyarakat.

Ditetapkan UU No 6 Tahun 2014 PEMDES, menjelaskan bahwa negara berikan wewenang terhadap PEMDES mengelola sistem kebijakan desa dan untuk pembangunan desa, untuk memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal. Dalam undang-undang tersebut, negara mengakui rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (bantuan), Desa, maka negara memberikan anggaran sepuluh per seratus persen sesuai dengan yang tertera di APBN terhadap PEMDES yang kemudian akan disesuaikan berdasarkan banyak masyarakat dan di data sesuai kondisi sosial agar, kemudian dapat tercapai tujuan yang inginkan maka DD agar digunakan keuangan desa dengan berdasarkan aturan yang ada. Hal tersebut kemudian diturunkan Peraturan menteri dalam negeri No 20/ 2018 yang berbunyi tata cara mengelola DD. Dengan demikian, PEMDES diberikan hak untuk merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, dan membuat mempertanggungjawabkan atas penggunaan serta proses evaluasi dari pada Dana Desanya sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka, pengamatan menarik diteliti tentang “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Desa Sumbergondo Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan studi pendahuluan dipaparkan diatas, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana evaluasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan DD di Desa Sumbergondo?
2. Apa Faktor Pendukung dan penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi proses Kebijakan Pemerintah Dalam mengelola DD di Desa sumbergondo.
2. Untuk mengetahui apa masalah evaluasi kebijakan pemerintah Desa Sumbergondo di dalam mengelola dana desa di desa Sumbergondo.

1.4. Manfaat penelitian

1. Setelah dilakukan pengamatan peneliti berharap, agar mendapatkan sumbangan ilmiah, Wawasan, Pengetahuan pada Pembaca dan Peneliti mengenai Evaluasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan dana desa, sekaligus berharap peneliti mendapatkan referensi atau literasi baru di lapangan.
2. Bagi Pemerintah, agar mendapatkn pedoman tentang rekomendasi pada Kebijakan PEMDES di dalam mengimplementasikan DD untuk mewujudkan kesetaraan atau kesejahteraan masyarakat.

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA SUMBERGONDO DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	akademik.unsoed.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
3	unsri.portalgaruda.org Internet Source	1%
4	ivanrasyiidblog.wordpress.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%

Exclude bibliography On